



AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Dinas Sosial Provinsi Banten melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Banten yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran yang di tetapkan dalam dokumen Renstra 2012-2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Sosial Provinsi Banten diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Penilaian

No.	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 - 100	Memuaskan
2.	A	> 75 - 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 - 75	Baik
4.	CC	> 50 - 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 - 50	Agak Kurang
6.	D	0 - 30	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab - sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum Dinas Sosial Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2012 - 2017 . Telah ditetapkan 6 sasaran dengan 14 indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari	2 indikator
Sasaran 2 terdiri dari	3 indikator
Sasaran 3 terdiri dari	1 indikator
Sasaran 4 terdiri dari	6 indikator
Sasaran 5 terdiri dari	1 indikator
Sasaran 6 terdiri dari	1 indikator

3.1. CAPAIAN KINERJA

Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Sosial Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal - hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal - hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah - langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik pada masa - masa yang akan datang.

Secara umum Dinas Sosial Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Provinsi Banten berjumlah 6 (enam) sasaran yang akan

dievaluasi, terdiri dari 14 (empat belas) indikator sasaran dan 6 (enam) program dengan 31 (tiga puluh satu) kegiatan tersebar pada Bidang Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, BPS, BP2S dan Sekretariat.

Dari 6 (enam) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator sasaran, pencapaian indikator sasaran Dinas Sosial Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Persentase Katagori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
MISI I			
1	Baik Sekali	8	100%
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang		
MISI II			
1	Baik Sekali	13	678%
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang		
MISI III			
1	Baik Sekali	4	223,17%
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang		

Akan tetapi kalau dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2017

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Tata Kelola		100 %
		Pemerintahan		
1 Mewujudkan Aparatur yang Bersih, Profesional, Bertanggungjawab dan Sejahtera	1 Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas Aparatur		1 Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100 %
		Penyusunan Laporan		22 Dok
		Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 Dok
			2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dok
			3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dok
			2 Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100 %
		Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		18 Dok
			1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dok
			2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dok
			3 Penyusunan RENSTRA OPD	1 Dok
			4 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	5 Dok
			5 Monitoring dan Evaluasi	- Dok
	2 Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana		3 Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		23 Unit
			1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	23 Unit
			2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor	- M
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPS		96 Unit
			1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPS	96 Unit
			2 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor pada BPS	- M

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengadaan Sarana dan		28 Unit
		Prasarana Kantor	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	28 Unit
		pada BP2S	pada BP2S	
			2 Pengadaan/Pembangunan	- M
			Gedung/Kantor pada BPS	
		Pemeliharaan Sarana		143 Paket
		dan Prasarana Kantor	1 Pemeliharaan & Rehabilitasi Gedung/Kantor	7 Paket
			2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	30 Unit
			3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	106 Bulan
		Pemeliharaan Sarana		55 Paket
		dan Prasarana Kantor	1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung /	5 Paket
		pada BPS	Kantor pada BPS	
			2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit
			pada BPS	
			3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	42 Bulan
			pada BPS	
		Pemeliharaan Sarana		61 Paket
		dan Prasarana Kantor	1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung /	1 Paket
		pada BP2S	Kantor pada BP2S	
			2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	7 Unit
			pada BP2S	
			3 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK	53 Bulan
			pada BP2S	
			4 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi	<u>100 %</u>
			Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan	
			Kerumahtanggaan	
		Penyediaan Barang dan		12 Bulan
		Jasa Perkantoran	1 Operasional Kantor Tidak Tetap	104 Org
			2 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan	2 Paket
			Halaman (Outsourcing)	
			3 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan
			4 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan
			5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan
			6 Penyediaan Promosi dan Publikasi	6 Media
			7 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan
			8 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	- Paket
			9 Penyediaan BBM	12 Bulan

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPS	1 Operasional Kantor Tidak Tetap pada BPS 2 Penyediaan Barang Habis Pakai pada BPS 3 Penyediaan Bahan Cetak pada BPS 4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor pada BPS 5 Penyediaan Promosi dan Publikasi pada BPS 6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor pada BPS 7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo pada BPS 8 Penyediaan BBM pada BPS	12 Bulan 29 Org 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Media 12 Bulan - Paket 12 Bulan
		Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BP2S	1 Operasional Kantor Tidak Tetap pada BP2S 2 Penyediaan Barang Habis Pakai pada BP2S 3 Penyediaan Bahan Cetak pada BP2S 4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor pada BP2S 5 Penyediaan Promosi dan Publikasi pada BP2S 6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor pada BP2S 7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo pada BP2S 8 Penyediaan BBM pada BP2S	12 Bulan 23 Org/ 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 8 Media 12 Bulan - Paket 12 Bulan
			5 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	100 %
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 2 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan 12 Bulan
		Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPS	1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah pada BPS 2 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pada BPS	12 Bulan 12 Bulan
		Koordinasi & Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BP2S	1 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah pada BP2S 2 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pada BP2S	12 Bulan 12 Bulan
		Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	18 Dok 15 Dok 3 Keg

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program Perlindungan dan		56.689 Org
		Rehabilitasi Sosial		
2 Memfasilitasi PMKS	1 Penanganan Rumah		1 Cakupan PMKS (Fakir Miskin) Penerima Fasilitas	1.850 KK
dalam Mengakses dan	Tangga Miskin (RTM)		Pemberdayaan Sosial	
Memperoleh Pelayanan		Penanganan Fakir Miskin		950 KK
Sosial		Perdesaan	1 Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang	360 KK
			diberdayakan melalui KUBE	
			2 Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang	550 KK
			diberdayakan melalui RTLH	
			3 Jumlah Fakir Miskin Perdesaan yang	0 KK
		Penanganan Fakir Miskin		550 KK
		Perkotaan	1 Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang	320 KK
			diberdayakan melalui KUBE	
			2 Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang	230 KK
			diberdayakan melalui RTLH	
			3 Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang	0 KK
		Penanganan Fakir Miskin		350 KK
		Daerah Pesisir dan	1 Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan	160 KK
		Pulau-Pulau Kecil	Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan	
			melalui KUBE	
			2 Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan	150 KK
			Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan	
			melalui RTLH	
			3 Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan	0 KK
			Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan	
			melalui UEP	
	2 Meningkatnya		2 Cakupan PMKS yang Mendapatkan	1.429 Org
	Pelayanan Sosial		Rehabilitasi Sosial	
	bagi PMKS	Rehabilitasi Sosial Anak		585 Org
		dan Lanjut Usia		
			1 Jumlah Anak yang Mendapatkan	35 Org
			Rehabilitasi Sosial	
			2 Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan	430 Org
			Rehabilitasi Sosial	
			3 Jumlah Lanjut Usia yang didampingi	120 Org
		Rehabilitasi Tuna Sosial,		346 Org
		Penyalahgunaan Napza dan	1 Jumlah Tuna Sosial yang Mendapatkan	250 Org
		Korban Perdagangan Orang	Rehabilitasi Sosial	
			2 Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang	30 Org
			3 Jumlah Korban Perdagangan Orang yang	30 Org
			4 Jumlah Korban Trafficking yang	6 Org
			5 Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan	30 Org

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Rehabilitasi Sosial		498 Org
		Penyandang Disabilitas		
			1 Jumlah Penyandang Disabilitas yang	203 Org
			1 Bimbingan Sosial dan Motivasi Penyandang Disabilitas	203 Org
			Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	
			2 Jumlah ODGJ yang Mendapatkan	32 Org
			2 Bimbingan Sosial dan Motivasi Eks ODGJ	32 Org
			Rehabilitasi Sosial	
			3 Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	95 Org
			3 Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	95 Org
			yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	
			4 Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas	200 Org
			4 Bimbingan Sosial dan Motivasi Keluarga Penyandang Disabilitas Berat	200 Org
			Berat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	
			3 Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (BPS)	280 Org
		Pelayanan & Perlindungan Sosial pada BPS		110 Org
			1 Jumlah PMKS Lanjut Usia Terlantar yang	60 Org
			Mendapatkan Pelayanan pada Balai	
			Perlindungan Sosial (BPS)	
			2 Jumlah PMKS Korban Tindak Kekerasan yang	30 Org
			Mendapatkan Pelayanan pada Balai	
			Perlindungan Sosial (BPS)	
			3 Jumlah PMKS Balita Terlantar yang	10 Org
			Mendapatkan Pelayanan pada Balai	
			Perlindungan Sosial (BPS)	
			4 Jumlah PMKS Tuna Grahita yang	10 Org
			Mendapatkan Pelayanan pada Balai	
			Perlindungan Sosial (BPS)	
		Penerimaan & Penyaluran pada BPS		170 Org
			1 Bantuan Peningkatan Gizi bagi Balita Terlantar	20 Org
			2 Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi WKTK dan Tuna Grahita	150 Org

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			4 Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	390 Org
		Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S	1 Jumlah PMKS yang diberikan Pelatihan Keterampilan pada Balai Perlindungan Sosial (BP2S)	180 Org
		Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial dan Keterampilan pada BP2S	2 Jumlah PMKS yang telah diseleksi dan disalurkan dalam Pelatihan Keterampilan pada BP2S	210 Org
			5 Cakupan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS Terintegrasi yang dikelola	3 Dok
		Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS & PSKS	1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Dok
			2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	- Dok
			3 Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Tahun
			4 Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS & PSKS	2 Dok
			5 Pengelolaan PPID	1 Tahun
			6 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat Perlindungan	2.120 Org
		Perlindungan Sosial Korban Bencana	1 Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam	1.400 Org
			2 Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial	1 Lok
			3 Jumlah Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar	300 Org
			4 Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana	420 Org
			7 Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial	48.993 Org
		Jaminan Sosial Keluarga	1 Jumlah Penerima Jaminan Sosial Keluarga	48.150 Org
			2 Jumlah Pendamping dan Operator Jaminan Sosial Keluarga dan PKH	843 Org

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3 Mengoptimalkan Tanggungjawab dan Kepedulian Sosial Perseorangan, Keluarga, Lembaga dan Masyarakat	1 Meningkatnya PSKS dan Membudayakan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial		8 Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Meningkatkan Partisipasi Sosialnya	1.624 Org
		Pemberdayaan Sosial		1.174 Org
		Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat		
			1 Jumlah PSKS yang dibina (Kelembagaan pada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial)	1.009 Org
			2 Jumlah PSKS yang difungsikan sebagai Pendamping	155 Org
			3 Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) yang mendapat Pemberdayaan Sosial	10 Org
		Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)		250 Org
			1 Jumlah Keluarga Pahlawan/Perintis Kemerdekaan yang dibina	100 Org
			2 Peringatan Hari Pahlawan	150 Org
			3 Jumlah TMP/MPN yang dipelihara	2 Lok
			4 Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)	- Org
		Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial		200 Org
			1 Capaian Persentase Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial yang dilaksanakan	200 Org

Adapun pengukuran kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dalam kurun waktu tahun 2015 - 2017 dapat dilihat pada lampiran.

3.2. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2017 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Gubernur Banten berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Pemerintah Provinsi Banten telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dinas Sosial Provinsi Banten menetapkan 3 (tiga) misi, 6 (enam) sasaran dan 25 (dua puluh lima) indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Banten, pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Ketercapaian Indikator pada masing-masing Sasaran terhadap Target

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Ketercapaian Target	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin	1	100%	Ketercapaian Indikator pada sasaran 1 sebesar 100%, yang bermakna Memuaskan
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	6	98,86%	Ketercapaian Indikator pada sasaran 6 sebesar 98,86%, yang bermakna Memuaskan
3.	Meningkatnya Kemam puan dan Kemauan Masyarakat, Lembaga Kesos dan Dunia Usaha	1	100%	Ketercapaian Indikator pada sasaran 1 sebesar 100%, yang bermakna Memuaskan
4.	Meningkatnya Kelembagaan dan Pembudayaan Kesetiakawanan sosial	1	100%	Ketercapaian Indikator pada sasaran 1 sebesar 100%, yang bermakna Memuaskan
5.	Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas Aparatur	2	100%	Ketercapaian Indikator pada sasaran 2 sebesar 100%, yang bermakna Memuaskan
6.	Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana	3	100%	Ketercapaian Indikator pada sasaran 3 sebesar 100%, yang bermakna Memuaskan

Setiap sasaran akan dievaluasi dan dianalisis dengan menarik indikator sasaran sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur

Dengan Sasaran :

- a. Meningkatkan Kompetensi dan kapabilitas aparatur;
- b. Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana.

Penjelasan Misi 1 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi dan Kapabilitas Aparatur.

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Perencanaan, Evaluasi Sasaran ini dicapai melalui program dan Pelaporan
2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Pertama
Dinas Sosial Provinsi Banten

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya	1 Rasio Dokumen Penatausahaan, Pengendalian	<u>100 %</u>	<u>100 %</u>	100
Kompetensi dan	dan Evaluasi Laporan Keuangan			
Kapabilitas Aparatur	a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan	22 Dok	22 Dok	100
	Neraca Aset			
	2 Rasio Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan	<u>100 %</u>	<u>100 %</u>	100
	Pelaporan			
	a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	18 Dok	18 Dok	100

Pada sasaran pertama Dinas Sosial Provinsi Banten, untuk melaksanakan kegiatan tersebut didukung anggaran sebesar Rp. 719.659.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 706.641.000 (98,19%) dan realisasi fisik 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena realisasi kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana

Sasaran ini dicapai melalui program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Dinsos
2. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPS
3. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BP2S
4. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah

5. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BPS
 6. Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada BP2S
 7. Peningkatan Kapasitas Aparatur
 8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS
 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2S
 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
 12. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS
 13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2S
- Serta dicapai pula melalui Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah yang didukung oleh kegiatan Penyediaan Data Pembangunan.

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Kedua
Dinas Sosial Provinsi Banten

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Meningkatnya	3 Rasio Pembangunan, Pengadaan,	100 %	100 %	100
Dukungan Sarana	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan			
dan Prasarana	Prasarana Aparatur			
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	23 Unit	23 Unit	100
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada	96 Unit	96 Unit	100
	Balai Perlindungan Sosial			
	c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada	28 Unit	28 Unit	100
	Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial			
	d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	143 Unit	143 Unit	100
	e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	55 Unit	55 Unit	100
	pada Balai Perlindungan Sosial			
	f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	61 Unit	61 Unit	100
	pada BP2S			
	4 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi	100 %	100 %	100
	Perkantoran serta Pelayanan Tatausaha dan			
	Kerumahtanggaan			
	a. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
	b. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100
	Pada Balai Perlindungan Sosial			

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial	12 Bulan	12 Bulan	100
	5 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah	100 %	100 %	100
	a. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
	b. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Pada Balai Perlindungan Sosial	12 Bulan	12 Bulan	100
	c. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah pada BP2S	12 Bulan	12 Bulan	100

Untuk sasaran kedua Dinas Sosial Provinsi Banten, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9.749.501.982 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.464.940.643 (97,08%) dan realisasi fisik 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena realisasi kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dan merupakan kegiatan rutin Dinas Sosial Provinsi Banten.

Misi 2 : Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Sasaran :

- a. Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM);
- b. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penjelasan Misi 2 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 3 : Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM).

Sasaran ini dicapai melalui program Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
2. Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
3. Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga
Dinas Sosial Provinsi Banten

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Penanganan Rumah Tangga Miskin (RTM)	1 Cakupan PMKS (Fakir Miskin) Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial	1.850 KK	1.850 KK	100,00
	a. Jumlah Fakir Miskin Pedesaan yang diberdayakan melalui KUBE	950 KK	950 KK	100,00
	b. Jumlah Fakir Miskin Pedesaan yang diberdayakan melalui RTLH	360 KK	360 KK	100,00
	c. Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang diberdayakan melalui KUBE	550 KK	550 KK	100,00
	d. Jumlah Fakir Miskin Perkotaan yang diberdayakan melalui RTLH	320 KK	320 KK	100,00
	e. Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan melalui KUBE	230 KK	230 KK	100,00
	f. Jumlah Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diberdayakan melalui RTLH	350 KK	350 KK	100,00
		160 KK	160 KK	100,00
		150 KK	150 KK	100,00

Sasaran ketiga Dinas Sosial Provinsi Banten, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.650.901.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.642.722.000 (99,78%) dan realisasi fisik 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena realisasi kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dan merupakan kegiatan rutin Dinas Sosial Provinsi Banten.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran ini dicapai melalui program Rehabilitasi Sosial yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia
2. Rehabilitasi Sosial Bagi Tuna Sosial dan Eks Napza
3. Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Cacat & Eks Penyakit Kronis
4. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Klien BPS
5. Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran Pada BPS
6. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Pada BP2S
7. Penerimaan dan Penyaluran Pada BP2S

Serta dicapai melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan didukung oleh kegiatan :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana
2. Jaminan Sosial Keluarga
3. Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Keempat
Dinas Sosial Provinsi Banten

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Meningkatnya	2 Cakupan PMKS yang Mendapatkan	1.461 Org	1.461 Org	100,00
Pelayanan Sosial	Rehabilitasi Sosial			
bagi PMKS		585 Org	585 Org	100,00
	a. Jumlah Anak yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	35 Org	35 Org	100,00
	b. Jumlah Lansia yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	430 Org	430 Org	100,00
	c. Jumlah Lanjut Usia yang didampingi	120 Org	120 Org	100,00
		346 Org	346 Org	100,00
	d. Jumlah Tuna Sosial yang Mendapatkan Rehabsos	250 Org	250 Org	100,00
	e. Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	30 Org	30 Org	100,00
	f. Jumlah Korban Perdagangan Orang yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	30 Org	30 Org	100,00
	g. Jumlah Korban Trafficking yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	6 Org	6 Org	100,00
	h. Jumlah Pekerja Migran yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	30 Org	30 Org	100,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		530 Org	530 Org	100,00
	i. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	203 Org	203 Org	100,00
	j. Jumlah ODGJ yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	32 Org	32 Org	100,00
	k. Jumlah Anak Dengan Kedisabilitan (ADK) yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	95 Org	95 Org	100,00
	l. Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Berat yang Mendapatkan Bimbingan Sosial	200 Org	200 Org	100,00
	3 Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada BPS	280 Org	280 Org	100,00
		110 Org	110 Org	100,00
	a. Jumlah PMKS Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan pada BPS	60 Org	60 Org	100,00
	b. Jumlah PMKS Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan pada BPS	30 Org	30 Org	100,00
	c. Jumlah PMKS Balita Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan pada BPS	10 Org	10 Org	100,00
	d. Jumlah PMKS Tuna Grahita yang Mendapatkan Pelayanan pada BPS	10 Org	10 Org	100,00
		170 Org	170 Org	100,00
	e. Bantuan Peningkatan Gizi bagi Balita Terlantar	20 Org	20 Org	100,00
	f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi WTK dan Tuna Grahita	150 Org	150 Org	100,00
	4 Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan & Pengembangan Sosial (BP2S)	390 Org	390 Org	100,00
	a. Jumlah PMKS yang diberikan Pelatihan Keterampilan pada BP2S	180 Org	180 Org	100,00
	b. Jumlah PMKS yang telah diseleksi dan disalurkan dalam Pelatihan Keterampilan pada BP2S	210 Org	210 Org	100,00
	5 Cakupan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS Terintegrasi yang dikelola	3 Dok	3 Dok	100,00
		3 Dok	3 Dok	100,00
	a. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	100,00
	b. Pengelolaan Website Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100,00
	c. Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS & PSKS	2 Dok	2 Dok	100,00
	d. Pengelolaan PPID	1 Tahun	1 Tahun	100,00
	6 Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat Perlindungan	2.120 Org	2.120 Org	100,00
		2.120 Org	2.120 Org	100,00
	a. Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam	1.400 Org	1.400 Org	100,00
	b. Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial	1 Lok	1 Lok	100,00
	c. Jumlah Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar	300 Org	300 Org	100,00
	d. Jumlah Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana	420 Org	420 Org	100,00

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	7 Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan	48.993 Org	48.384 Org	98,76
	Jaminan Sosial			
		48.993 Org	48.384 Org	98,76
	a. Jumlah Penerima Jaminan Sosial Keluarga	48.150 Org	47.541 Org	98,74
	b. Jumlah Pendamping dan Operator Jaminan Sosial	843 Org	843 Org	100,00
	Keluarga dan PKH			

Untuk Sasaran keempat Dinas Sosial Provinsi Banten, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 26.101.557.113 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.786.045.322 (98,79%) dan realisasi fisik 99,09%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut terlihat bahwa pada sasaran keempat hampir keseluruhan indikator kinerja mencapai realisasi 100%, hanya ada satu indikator kinerja yang hanya mencapai realisasi 98,76% yaitu indikator Cakupan Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial, hal ini disebabkan jumlah penerima Jaminan Sosial Keluarga hanya terealisasi 47.541 RTS dari target 48.150 RTS (98,74%).

Misi 3 : Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kemampuan dan Kemauan Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha;
- b. Meningkatnya Kelembagaan dan Pembudayaan Kesetiakawanan Sosial.

Penjelasan Misi 3 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 5 : Meningkatnya Kemampuan dan Kemauan Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha.

Sasaran ini dicapai melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Lima
Dinas Sosial Provinsi Banten

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Meningkatnya PSKS dan Membudayakan Nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial	8 Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Meningkatkan Partisipasi Sosialnya	1.624 Org	1.624 Org	100,00
		1.174 Org	1.174 Org	100,00
	a. Jumlah PSKS yang dibina (Kelembagaan pada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jamsos)	1.009 Org	1.009 Org	100,00
	b. Jumlah PSKS yang difungsikan sebagai Pendamping	155 Org	155 Org	100,00
	c. Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) yang mendapat Pemberdayaan Sosial	10 Org	10 Org	100,00

Untuk sasaran Kelima Dinas Sosial Provinsi Banten, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.828.080.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.752.020.000 (98,42%) dan realisasi fisik 99,78%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena realisasi kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dan merupakan kegiatan rutin Dinas Sosial Provinsi Banten.

Sasaran 6 : Meningkatnya Kelembagaan dan Pembudayaan Kesetiakawanan Sosial.

Sasaran ini dicapai melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)
2. Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Keenam
Dinas Sosial Provinsi Banten

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d. Jumlah Keluarga Pahlawan/Perintis Kemerdekaan yang dibina	100 Org	100 Org	100,00
	e. Peringatan Hari Pahlawan	150 Org	150 Org	100,00
	f. Jumlah TMP/MPN yang dipelihara	2 Lok	2 Lok	100,00
		200 Org	200 Org	100,00
	h. Capaian Persentase Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	200 Org	200 Org	100,00

Untuk sasaran keenam Dinas Sosial Provinsi Banten, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.646.227.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.567.948.407 (95,24%) dan realisasi fisik 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel tersebut terlihat bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena realisasi kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dan merupakan kegiatan rutin Dinas Sosial Provinsi Banten.

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2017, Dinas Sosial Provinsi Banten memperoleh alokasi anggaran pembangunan bidang sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 64.095.926.595,- (*Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Dari hasil analisis yang dilakukan baik terhadap pencapaian kinerja program dan kegiatan maupun pencapaian sasaran Dinas Sosial pada tahun 2017 hampir semua kegiatan mencapai lebih dari 90%, yaitu pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. 61.217.511.538,- (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) atau 95,51% dan realisasi fisik sejumlah 99,26% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.878.415.057,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*) atau 4,49%, hal tersebut disebabkan : adanya beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi Akomodasi dan Konsumsi kegiatan.

Adapun realisasi fisik maupun keuangan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2017 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi Banten
Sumber Dana APBD Tahun 2017

No.	Nama Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran	
			Fisik %	Keuangan		[Rp.]	%
				[Rp.]	%		
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.400.000.000	100,00	15.297.194.166,00	87,91	2.102.805.834,00	12,09
II.	BELANJA LANGSUNG						
	<u>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah</u>						
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	54.200.000	94,71	51.332.000,00	94,71	2.868.000,00	5,29
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	665.459.000	100,00	655.309.000,00	98,47	10.150.000,00	1,53
	<u>Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur</u>						
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	816.593.450	100,00	801.488.450,00	98,15	15.105.000,00	1,85
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	898.512.700	100,00	870.214.086,00	96,85	28.298.614,00	3,15
5	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	4.174.552.932	100,00	4.082.062.948,00	97,78	92.489.984,00	2,22
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	42.155.000	100,00	35.155.000,00	83,39	7.000.000,00	16,61
7	Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah	801.899.500	100,00	777.989.250,00	97,02	23.910.250,00	2,98
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BPS	456.430.000	96,39	439.938.315,00	96,39	16.491.685,00	3,61
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada BP2S	253.098.000	87,95	222.600.000,00	87,95	30.498.000,00	12,05
10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPS	582.210.000	97,31	566.197.711,00	97,25	16.012.289,00	2,75
11	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BP2S	99.125.400	99,55	97.874.954,00	98,74	1.250.446,00	1,26
12	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPS	672.275.000	99,82	670.194.428,00	99,69	2.080.572,00	0,31
13	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BP2S	793.600.000	95,21	752.826.501,00	94,86	40.773.499,00	5,14
14	Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah Pada BPS	87.500.000	88,28	77.249.000,00	88,28	10.251.000,00	11,72
15	Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah Pada BP2S	71.550.000	99,44	71.150.000,00	99,44	400.000,00	0,56

No.	Nama Program / Kegiatan / Tolok Ukur	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran	
			Fisik %	Keuangan		[Rp.]	%
				[Rp.]	%		
	<u>Penanganan Fakir Miskin</u>						
16	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	979.116.000	99,54	973.277.000,00	99,40	5.839.000,00	0,60
17	Penanganan Fakir Miskin Pedesaan	1.861.688.000	99,90	1.859.814.000,00	99,90	1.874.000,00	0,10
18	Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil	810.097.000	100,00	809.631.000,00	99,94	466.000,00	0,06
	<u>Rehabilitasi Sosial</u>			-			
19	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	3.240.000.000	100,00	3.227.183.500,00	99,60	12.816.500,00	0,40
20	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang	1.892.541.113	99,79	1.859.459.126,00	98,25	33.081.987,00	1,75
21	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1.339.345.000	99,57	1.323.144.000,00	98,79	16.201.000,00	1,21
22	Pelayanan dan Perlindungan Sosial Pada BPS	1.259.925.000	100,00	1.259.747.450,00	99,99	177.550,00	0,01
23	Penerimaan dan Penyaluran pada BPS	574.054.000	99,87	571.626.500,00	99,58	2.427.500,00	0,42
24	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S	1.158.785.000	99,52	1.148.555.000,00	99,12	10.230.000,00	0,88
25	Penerimaan dan Penyaluran Pada BP2S	1.445.302.000	98,53	1.423.157.000,00	98,47	22.145.000,00	1,53
	<u>Perlindungan dan Jaminan Sosial</u>						
26	Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	421.570.000	100,00	420.355.000,00	99,71	1.215.000,00	0,29
27	Perlindungan Sosial Korban Bencana	4.528.660.000	95,58	4.316.128.246,00	95,31	212.531.754,00	4,69
28	Jaminan Sosial Keluarga	10.241.375.000	100,00	10.236.689.500,00	99,95	4.685.500,00	0,05
	<u>Pemberdayaan Sosial</u>	-		-			
29	Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	4.828.080.000	99,78	4.752.020.000	98,42	76.060.000	1,58
30	Kepahlawanan, Keberintisan, Keuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	886.367.500	92,34	809.336.407,00	91,31	77.031.093,00	8,69
31	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	759.860.000	99,87	758.612.000,00	99,84	1.248.000,00	0,16
	JUMLAH	64.095.926.595	99,26	61.217.511.538	95,51	2.878.415.057,00	4,49

3.4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

3.4.1. PERMASALAHAN

Dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan terhadap program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten pada tahun anggaran 2017 pada realisasi fisik mencapai 99,26%. Sedangkan pada realisasi keuangan mencapai 95,51%. Walaupun secara kinerja sudah memperlihatkan angka yang baik namun dalam usaha Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Banten.

Dari total anggaran Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2017 sebesar Rp. 64.095.926.595,- (*Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), sampai dengan 31 Desember 2017 realisasi keuangan mencapai Rp. 61.217.511.538,- (*Enam Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) atau 95,51% dan realisasi fisik sejumlah 99,26% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.878.415.057,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*) atau 4,49%, hal tersebut disebabkan :

1. Pada Belanja Tidak Langsung capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 15.297.194.166 (87,91%) dengan sisa anggaran Rp. 2.102.805.834 (12,09%), hal tersebut dikarenakan adanya pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten yang pensiun sebanyak 4 orang, meninggal sebanyak 2 orang, pindah ke SKPD lain sebanyak 2 orang sehingga Gaji dan Tunjangan Kinerja tidak dapat diserap.
2. Pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana terdapat tolok ukur Asuransi Jiwa TAGANA sebesar Rp. 145.200.000 tidak dapat dicairkan karena sebagian besar peserta TAGANA tidak dapat melampirkan KTP dan KK.

3. Pada beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi anggaran.

3.4.2. SOLUSI

Solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2018 lebih di pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan anggaran.
2. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yang valid dan terukur.